

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.² Salah satu sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur.³ Sebagai bentuk tujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan, memajukan kesejahteraan rakyat, serta memungkinkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan lokal.⁴

Pendapatan asli daerah atau biasa dikenal PAD adalah penghasilan yang didapat oleh pemerintah daerah pada saat menjalankan aktifitas pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat, dan juga penggunaan sumber daya yang pemerintah daerah miliki. PAD ini penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur lokal, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan

² Latif Syaipudin. "Contribution Of Young Entrepreneurs In Building The Creative Economy Of Village Communities." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 12.1 (2023): 80-98.

³ Zulkifli Rahman Susanto, and Novi Khoiriawati. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung." *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan* 3.1, Juni (2022): 8-19.

⁴ Yulina Nadia Anggraini, and Dyah Pravitasari. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6.2 (2022): 212-227.

berbagai keperluan lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.⁵ Pemerintah daerah berperan untuk merencanakan, mengelola, dan menggunakan PAD secara bijak guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.⁶

PAD sejalan dengan ayat Al-Quran pada QS Al An'am ayat 165 yang menjelaskan sebagai berikut:⁷

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (الانعام : ١٦٥)

Artinya: “dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa- penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An'am: 165).

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Quram tersebut, ditujukan kepada para penguasa/pemerintah dalam suatu Negara atau daerah atas amanah untuk kepentingan rakyat. Maka ayat diatas menjelaskan tentang kemandirian keuangan yaitu penerimaan atau pengeluaran suatu daerah dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan kemampuan para pengelolanya.

⁵ Latif Syaipudin, and Idah Nurfajriya Awwalin. "Strategi Pengembangan Produksi Home Industry Batu Ziolit Untuk Meningkatkan Omzet Penjualan Di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung." *Journal Of Economics and Business* 1.1 (2023): 35-46.

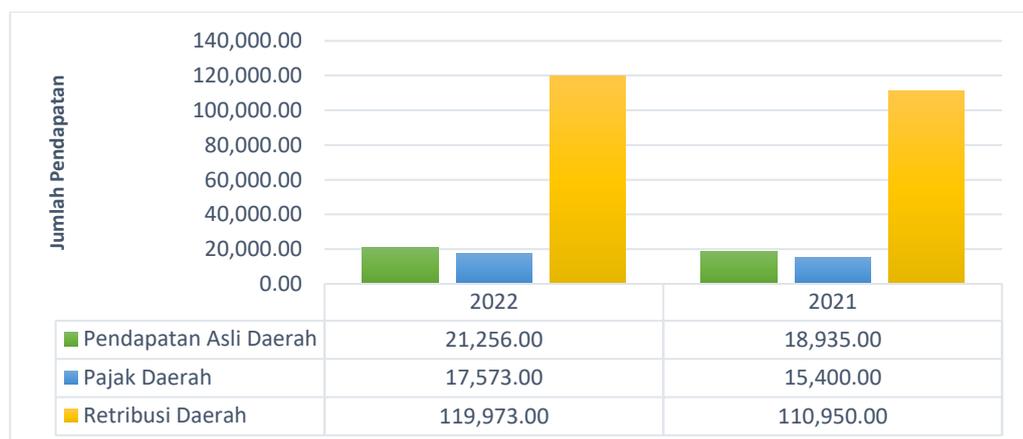
⁶ Liswatin. "Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1.3 (2022): 83-96.

⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 269.

Jika dihubungkan dengan PAD yaitu prinsip ini dapat diinterpretasikan sebagai tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya tersebut dengan baik, adil, dan bertanggung jawab. PAD digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, sesuai dengan prinsip keadilan dan kebaikan yang diajarkan dalam Al-Quran. Meskipun dalam implementasi prinsip-prinsip ini dapat menjadi tantangan, dan memerlukan perencanaan, tindakan nyata, serta pengawasan yang cermat untuk memastikan bahwa PAD benar-benar digunakan untuk kebaikan masyarakat dan pembangunan daerah sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika.

Selanjutnya grafik data keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan PAD, pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2021 sampai tahun 2022 sebagai berikut:

Grafik 1.1
Data Keuangan Daerah Provinsi dan Kota di Jawa Timur
Tahun 2021-2022



Sumber: BPS Jawa Timur tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa data keuangan pada provinsi di Jawa Timur dari tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami keuangan yang naik turun pada setiap tahun. Keadaan ini cukup membuktikan bahwa penyerapan

potensi PAD di Jawa Timur sudah berjalan dan memenuhi target secara baik. Provinsi Jawa Timur mampu membuktikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk pembangunan daerah itu sendiri.

Pemerintah daerah harus memiliki kebijakan yang tepat dalam menentukan jenis, besaran, dan pengelolaan pajak daerah serta retribusi daerah agar dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah.⁸ Sumber PAD terdiri dari beberapa faktor yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga Optimalisasi penerimaan PAD dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan keadilan sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.⁹

Pajak daerah adalah pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada warga atau pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar berdasarkan undang-undang. Pajak daerah merupakan instrumen yang kuat untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas lokal. Contoh pajak daerah di Indonesia meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.¹⁰

⁸ Latif Syaipudin. "Contribution Of Young Entrepreneurs In Building The Creative Economy Of Village Communities." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 12.1 (2023): 80-98.

⁹ Zulkifli Rahman Susanto, and Novi Khoiriawati. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung." *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan* 3.1, Juni (2022): 8-19.

¹⁰ Ria Sintha Devi, Novi Juli Rosani Zulkarnaen, and Rani Ika Pratiwi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Studi Pelaksanaan Di Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Kota Binjai." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.2 (2021): 195-211.

PAD dan pajak daerah adalah dua konsep yang erat terkait dalam pajak daerah dan sistem keuangan daerah di Indonesia. Hubungan pajak daerah dan PAD adalah sumber pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari sumber daya dan potensi ekonomi yang ada di wilayah.¹¹ Jika dihubungkan maka PAD tanpa memberikan beban berlebihan pada masyarakat dan sektor usaha, serta memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara efektif dan efisien untuk memajukan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.¹²

Semakin tinggi pajak daerah maka semakin tinggi pula PAD karena pada dasarnya, peningkatan tarif pajak daerah dapat menghasilkan PAD yang lebih tinggi jika dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat. Dilakukannya peningkatan tarif pajak daerah dapat menghasilkan lebih banyak penerimaan fiskal bagi pemerintah daerah, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek yang mendukung kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah. Kebijakan ini harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh pada ekonomi, masyarakat, dan bisnis di daerah tersebut.

Sejalan dengan hasil penelitian yang pertama dilakukan oleh Sudarmana dan Sudiarta tahun 2020, menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.¹³ Penelitian kedua yang dilakukan oleh Fauzan Haqiqi

¹¹ Novi Khoiriawati, and Dianita Meirini. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak." *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting* 3.2 (2022): 96-109.

¹² Novi Khoiriawati, and Dianita Meirini. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak." *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting* 3.2 (2022): 96-109.

¹³ I. Putu Agus Sudarmana, and Gede Mertha Sudiarta. "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9.4 (2020): 1338.

tahun 2020, membuktikan bahwa hasil perhitungan diterima artinya terdapat pengaruh variabel Pajak Daerah (X1) terhadap PAD (Y).¹⁴ Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rifai dan Priono tahun 2022, bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Venantya Asmanda dan Galih Wicakson tahun 2022, bahwa pajak daerah mempunyai tingkat efektivitas terhadap PAD.¹⁶ Penelitian keempat yang dilakukan oleh Rizki, Nengseh dan Agustin tahun 2021, bahwa Pajak daerah berpengaruh terhadap PAD.¹⁷ Penelitian kelima yang dilakukan oleh Hanifah dan Irawan tahun 2022, bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap PAD.¹⁸

Pajak daerah adalah salah satu instrumen penting dalam menghasilkan PAD karena merupakan sumber utama pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai fungsi dan program pelayanan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan lainnya.¹⁹ Pemerintah daerah harus dapat lebih stabil dalam menghadapi

¹⁴ Fauzan Haqiqi. "Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode 2016-2018." *Jurnal Cafeteria* 1.1 (2020): 13-21.

¹⁵ Alifia Dina Rifai, and Hero Priono. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6.2 (2022): 434-438.

¹⁶ Asmandani, Venantya, and Galih Wicaksono. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso." *Electronic Journal of Social and Political Sciences UNEJ* 9.4 (2022): 416-424.

¹⁷ Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, and Karmila Agustin. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota." *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.1 (2021): 68-82.

¹⁸ Jilan Haura Hanifa, and Arry Irawan. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) di Kota Bandung Tahun 2016-2020." *Indonesian Accounting Research Journal* 2.2 (2022): 130-142.

¹⁹ Anggrilia Mega Saputri, and Novi Khoiriawati. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan." *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)* 1.1 (2021): 14-23.

fluktuasi ekonomi atau perubahan dalam sumber-sumber pendapatan lainnya secara keseluruhan.²⁰

Retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Retribusi daerah adalah jenis pajak yang dikenakan atas pemanfaatan fasilitas atau layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah adalah pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pemberian suatu pelayanan atau penggunaan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Contoh retribusi daerah meliputi biaya penggunaan pasar, biaya pelayanan kebersihan, biaya parkir, dan biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah.²¹

Sumber-sumber retribusi daerah di Indonesia meliputi retribusi jasa umum yang mencakup pemanfaatan jasa atau fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti pasar, terminal, dan tempat rekreasi. Retribusi perizinan yaitu pemberian izin-izin tertentu, seperti izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan, dan izin usaha perdagangan. Retribusi pengelolaan sampah dan pembersihan lingkungan atas pedagang yang berjualan di pasar-pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah dan retribusi daerah lainnya yang dapat dikenakan oleh pemerintah daerah, tergantung pada kebijakan dan regulasi setempat.²²

²⁰ Latif Syaipudin, and Idah Nurfajriya Awwalin. "Analysis Traditional Market Revitalization For Economic Improvement of Kras Market Kediri." *MAR-Ekonomi: Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Rumpun Ilmu Ekonomi* 1.02 (2023): 32-41.

²¹ Yahya Nusa, and Ludia Panggalo. "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021." *Journal of Financial and Tax* 2.2 (2022): 145-158.

²² Anggrilia Mega Saputri, and Novi Khoiriawati. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan." *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)* 1.1 (2021): 14-23.

Semakin tinggi retribusi daerah maka semakin tinggi PAD, sebab peningkatan retribusi daerah dapat berkontribusi pada peningkatan PAD jika diterapkan secara bijaksana dan dengan memperhatikan beberapa faktor penting. Implementasi peningkatan retribusi daerah harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan transparansi dalam komunikasi kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung keuangan daerah tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus memahami dampaknya dan melakukan analisis dampak secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan tentang peningkatan retribusi.

Sejalan dengan penelitian pertama, yang dilakukan oleh Haqiqi menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel retribusi daerah terhadap pendapatan daerah.²³ Sejalan dengan penelitian kedua, yang dilakukan oleh and Andi Kartika bahwa hasil penelitian menyatakan variabel Retribusi Daerah berpengaruh atau berpengaruh positif terhadap PAD.²⁴ Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Kasih dan Sulistyowati bahwa hasil penelitian menyatakan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.²⁵ Hal ini disebabkan karena PAD dapat tercapai jika menemukan keberhasilan pada retribusi daerah. Sehingga pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang bijak dalam mengatur jenis, besaran, dan pengelolaan retribusi ini. Kebijakan tersebut harus

²³ Fauzan Haqiqi. "Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode 2016-2018." *Jurnal Cafeteria* 1.1 (2020): 13-21.

²⁴ Diah Ayuk Wulandari, and Andi Kartika. "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *Derivatif: Jurnal Manajemen* 15.2 (2021): 164-179.

²⁵ Margareta Wihelmina Rosa Kasih, and Erna Sulistyowati. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2 (2022): 11869-11876.

mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan yang dihasilkan dan dampak terhadap masyarakat dan sektor usaha

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama dalam membentuk PAD. Sebagaimana Jawa Timur, sebagai provinsi dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, bisa menghasilkan pendapatan yang substansial dari berbagai pajak dan retribusi. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Saputry menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh dan dapat menjelaskan PAD sebesar 65,1% sisanya sebesar 34,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.²⁶ Maka pajak daerah dan retribusi daerah yang sah merupakan sumber PAD dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber PAD yang paling potensial adalah pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021-2022 (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur).”**

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di provinsi Jawa Timur. Batasan masalah dalam penelitian

²⁶ Vika Saputri. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara." *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 5.1 (2019): 1-13.

²⁷ Krisna Uli Hutagaol, Septony B. Siahaan, and Mitha Christina Ginting. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba." *SiAkun: Jurnal Skripsi Akuntansi* 1.1 (2023): 88-95.

ini memiliki pembahasan yang cukup luas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh pajak daerah pada 38 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Karena dalam pembahasan terlalu meluas akan perlu adanya pembatasan masalah, yang diharapkan dengan adanya pembatasan masalah tidak membuat pembahasan keluar dari fokus penelitian. Adapun batasan masalah yang dilakukan akan mengidentifikasi dan mengkaji tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD pada 38 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang di batasi hanya tahun 2021-2022.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam merancang penelitian sebagai arah dan fokus yang jelas pada seluruh proses penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022?
2. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap PAD pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022?
3. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian digunakan untuk membantu peneliti agar tetap fokus dan terarah dalam melaksanakan setiap tahap penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022.

2. Menguji pengaruh pajak daerah terhadap PAD pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022.
3. Menguji pengaruh retribusi daerah terhadap PAD pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil kajian dalam penelitian ini diinginkan semoga dapat menambah khazanah ilmiah dalam mata kuliah terutama yang berkenaan dengan Perpajakan dan PAD.

2. Kegunaan Praktis

a. Akademisi

Hasil penelitian ini semoga dapat digunakan untuk acuan dan penambahan wawasan akademik khususnya tentang suatu pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

b. Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk tambahan koleksi penelitian bagi institusi khususnya di bidang kajian khusus tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di provinsi dan kota Jawa Timur.

c. Pihak Lain

Penelitian ini dapat digunakan referensi untuk menganalisis mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan menggali dan mengelola pembiayaan untuk pelaksanaan otonomi daerah guna membangun kemandirian daerah sebagai wujud asas desentralisasi.²⁸

b. Pajak Daerah

Pajak daerah secara spesifik yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁹

c. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³⁰

²⁸ Mardiasmo. *Perpajakan: Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Andi, 2016). hal. 115

²⁹ Siti Resmi. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Sembilan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2016). hal. 33

³⁰ Aries Djaeunuri, *Hubungan Keuangan Pusat- Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hal.88

2. Definisi Operasional

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di provinsi Jawa Timur. Setelah penelitian selesai dilaksanakan kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD pada 38 Kabupaten di Provinsi dan kota Jawa Timur Tahun 2021-2022.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian skripsi memiliki tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal penelitian ini terdiri dari cover, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari 6 (enam) bab yang digunakan untuk skripsi antara lain:

Pada bab I berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan. Pada bab pertama ini membahas mengenai dasar atas latar belakang yang dijabarkan dalam bentuk konteks penelitian yang sesuai dengan judul penelitian dan sudah ditentukan.

Pada bab II berisi tentang kajian pustaka yang digunakan sebagai pedoman penulisan skripsi, berkaitan dengan bab I adalah bab II yang menjelaskan tentang teori yang digunakan sesuai dengan judul penelitian kemudian dijadikan acuan sebagai pendukung teori yaitu pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, penelitian terdahulu dan paradigma penelitian serta hipotesis penelitian.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Pada bab IV berisi tentang uraian paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

Pada bab V Memuat tentang keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori yang ditemukan sebelumnya, serta intepetasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

Pada bab IV berisikan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan saran yang diberikan kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini berdasarkan hasil lapangan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisikan daftar rujukan, lampiran-lampiran dan surat yang mendukung jalanya proses penelitian.